

Judul : Paripurna Penuh Kebuntuan
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Paripurna Penuh Kebuntuan

Terdapat perbedaan terkait ambang batas pencalonan presiden, antara kelompok pendukung 0% dan kelompok yang mendukung 20%-25%.

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com

RAPAT paripurna pengambilan keputusan atas RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, kemarin, berlangsung alot dan syarat dengan kebuntuan politik. Rapat yang seharusnya dibuka pukul 09.00 WIB, terunda selama dua jam karena sejumlah fraksi masih menggelar rapat pleno. Fraksi-fraksi berkonsolidasi, mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi dalam forum paripurna.

"Banyak hal terkait perkembangan terkini, termasuk mengonsolidasi anggota agar kompak pada pilihan yang sudah disepakati," kata anggota DPR yang juga Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat dimintai konfirmasi.

Berdasarkan pantauan *Media Indonesia*, hingga pukul 10.26 WIB daftar hadir anggota dewan belum terisi semua. Sekitar pukul 11.00, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II yang dihadiri 534 anggota. Seusai Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyampaikan laporan hasil pembahasan, muncul beragam interupsi dari sejumlah anggota. Setelah itu, dilanjutkan dengan pandangan akhir setiap fraksi.

Berdasarkan pandangan tertulis yang dibacakan para jubir fraksi, terdapat perbedaan terkait ambang batas pencalonan presiden, antara kelompok pendukung 0% dengan kelompok pro 20%. Pukul 14.00 WIB, pemimpin rapat meskors paripurna guna memberi kesempatan fraksi-fraksi melakukan lobi selama dua jam.

Namun, hingga pukul 16.00, rapat belum

juga dimulai karena pimpinan fraksi dan pimpinan DPR masih melakukan lobi di ruang panja. Rapat dibuka kembali pukul 17.33, tetapi langsung ditutup untuk memberikan kesempatan tambahan buat fraksi-fraksi melanjutkan lobi. Rapat baru dibuka kembali pukul 22.20, dan hingga berita ini diturunkan pukul 23.00, rapat masih berlangsung.

Di saat proses lobi tengah berlangsung, muncul sejumlah isu. Antara lain, ada permintaan kelompok koalisi propemerintah agar pemimpin rapat diganti dari Fadli Zon ke Ketua DPR Setya Noanto. Tiga fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS meminta paripurna ditunda hingga Senin (24/7) karena ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan pimpinan partai masing-masing. Selain itu,

ada juga informasi menyebutkan ada fraksi yang bakal *walk out* bila usulan 0% tidak diterima.

Siap voting

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan sedianya mayoritas fraksi sudah siap melakukan voting untuk memutuskan

lima isu krusial. Fraksi-fraksi yang siap voting ialah kelompok yang memilih paket A, yakni *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, *parliamentary threshold* 4%, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara *sainte lague* murni, dan jumlah kursi per dapil 3-10. Paket itu didukung PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP.

Sementara itu, tiga fraksi, Gerindra, Demokrat, dan PKS memilih paket B, yaitu *presidential threshold* 0%, *parliamentary threshold* 4%, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara kuota *hare*, dan jumlah kursi per dapil 3-10. Adapun PAN tidak memilih paket mana pun. (P-3)

Lobi yang berlangsung selama berjam-jam, tidak mampu membawa titik temu bagi kelompok politik yang ada di Gedung DPR.